

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat memberikan kemudahan dalam mengakses dan menerima sebuah informasi sehingga mempengaruhi kehidupan manusia yang lebih dinamis (Parsaorantua dkk., 2017). Keterlibatan teknologi informasi memberikan dampak yang positif salah satunya dalam pelaksanaan operasional sebuah organisasi dengan menyelaraskan strategi bisnis dan teknologi informasi. Peranan teknologi dan informasi mempengaruhi berbagai sektor dalam mewujudkan sistem kerja yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan hasil kerja yang lebih cepat dan akurat (Bouty dkk., 2019). Salah satu sektor yang terlibat dalam penerapan teknologi informasi berada pada sektor pemerintahan dikarenakan dapat membantu dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Dalam mengupayakan hal tersebut, pemerintah Indonesia terdorong untuk membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik yang lebih baik dan menyeluruh. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh *E-Government Development Index* (EGDI) pada tahun 2020 Indonesia menduduki peringkat 88 dari 193 negara yang ada di dunia (United Nations, 2020). Penjelasan lebih lanjut dijelaskan pada Tabel I.1 Peringkat EGDI Tahun 2020.

Tabel I-1 Peringkat EGDI Tahun 2020.

No	Country	Region	Index
1	Denmark	Europe	0.9758
2	Republic of Korea	Asia	0.9560
3	Estonia	Europe	0.9473
4	Finland	Europe	0.9452
5	Australia	Oceania	0.9432
6	Sweden	Europe	0.9365

Sumber: UN *E-Government Knowledgebase, Country Data, United Nations, 2020*

Dengan demikian Pemerintah Indonesia melalui ketetapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa SPBE digunakan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Ruang lingkup dalam SPBE meliputi tata kelola SPBE, manajemen SPBE, audit teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggaraan SPBE, percepatan SPBE, serta pemantauan dan evaluasi SPBE. Dalam penerapan SPBE memerlukan adanya kerangka kerja berupa arsitektur SPBE. Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar yang mampu mendeskripsikan integrasi antara enam domain arsitektur dimulai dari proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE sehingga mampu menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

Salah satu unsur pada perancangan SPBE berada pada domain layanan. Domain layanan merupakan hasil dari penyusunan proses bisnis yang terintegrasi untuk pembangunan atau pengembangan aplikasi SPBE. Layanan SPBE terdiri dari layanan administrasi dan layanan publik berbasis elektronik. Layanan administrasi merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Sedangkan layanan publik merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (Peraturan Presiden Republik Indonesia, 2020).

Berdasarkan KemenPan-RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang pedoman evaluasi SPBE yang menjadi acuan pemerintahan daerah dalam mencapai nilai kematangan pelaksanaan SPBE yang memuaskan. Berikut merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE.

Tabel I-2 Indeks SPBE

No	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1.8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Sumber: Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), KemenPAN-RB, 2019

Dari tabel diatas mengenai nilai indeks evaluasi SPBE yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah di Indonesia, salah satunya Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan. Kabupaten Kuningan telah mengimplementasikan SPBE pada semua sektor. Namun pada tahun 2019, hasil evaluasi dan *monitoring* penilaian indeks Kabupaten Kuningan mendapatkan nilai indeks sebesar 2,11 dengan predikat pelaksanaan SPBE untuk saat ini belum memuaskan, khususnya pada domain layanan SPBE yang hanya mendapatkan indeks penilaian 2,61 dengan predikat layanan administrasi pemerintahan mendapatkan indeks 2.57 (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, 2019). Hal ini yang menunjukkan adanya permasalahan dalam penerapan SPBE dengan belum optimalnya layanan SPBE yang terpadu. Oleh karena itu berdasarkan RPJMD Kabupaten Kuningan tahun 2018 – 2023 sesuai dengan visi dan misinya untuk mewujudkan mutu pelayanan, akuntabilitas, dan transparansi pemerintahan dengan meningkatkan kecepatan dan ketepatan pengelolaan data dan informasi publik melalui Sistem Informasi Terpadu dengan menerapkan layanan yang berorientasi terhadap proses bisnis dan aplikasi sebagai upaya optimalisasi layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik dalam mendukung kenaikan nilai indeks SPBE Kabupaten Kuningan serta peningkatan keberlangsungan penyampaian layanan kepada masyarakat luas (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan 2018 - 2023, 2018).

Solusi yang diberikan dalam melakukan perbaikan pelaksanaan keberhasilan SPBE pada Kabupaten Kuningan yaitu dengan menerapkan *Enterprise Architecture* sebagai pendekatan yang mampu menyelaraskan proses bisnis, teknologi, infrastruktur dengan visi, misi, dan layanan informasi pada suatu

organisasi sehingga mampu membangun *sustainability organization*. Dengan demikian dalam penelitian ini berfokus pada penggambaran EA menggunakan model implementatif pada domain layanan sesuai dengan Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018 dan Dokumen RPJMD Kabupaten Kuningan dalam penerapan SPBE pada Kabupaten Kuningan.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mendapat rumusan masalah pada penelitian tugas akhir ini, yaitu bagaimana gambaran model EA pada domain layanan di dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan berdasarkan amanah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian diatas, penelitian ini berfokus pada domain layanan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan yaitu melakukan rancangan dan menghasilkan pemodelan EA pada domain layanan yang sesuai dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018.

I.4 Batasan Masalah

Batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ruang lingkup fokus penelitian terdapat domain layanan sesuai dengan program prioritas pada RPJMD tahun 2018-2023 di dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Rencana strategis SPBE berdasarkan Peraturan Presiden No. 95 tahun 2018 dijadikan sebagai acuan dalam penggambaran model implementatif EA pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
3. Penelitian ini mengadopsi *best practice* TOGAF ADM dalam perancangan EA SPBE domain layanan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.

I.5 Manfaat Penelitian

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat berikut:

1. Memberikan sebuah usulan melalui penggambaran Model EA pada Domain Layanan di Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dalam mengoptimalkan

dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja layanan SPBE di Kabupaten Kuningan.

2. Menjadikan referensi yang berkaitan dengan perancangan EA Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Pemerintah Daerah bagi pembaca

I.6 Sistematika Penulisan

Berikut ini merupakan alur sistematika penulisan:

Bab I Pendahuluan

Bab ini mendeskripsikan topik penelitian mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan dasar teori yang digunakan dalam penelitian, yaitu mengenai *Enterprise Architecture, framework* TOGAF ADM, dan Arsitektur SPBE yang digunakan dalam penelitian ini beserta dengan teori-teori penunjang penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan pelaksanaan penelitian mulai dari tahapan-tahapan yang dilakukan selama penelitian, pelaksanaan penelitian, dan metode konseptual.

Bab IV Persiapan dan Identifikasi Data

Bab ini berisi tahapan persiapan yang terdiri dari identifikasi *input* berdasarkan TOGAF ADM dan Arsitektur SPBE pada domain layanan, identifikasi kebutuhan data dan menjelaskan deskripsi objek penelitian, gambaran umum organisasi, visi misi organisasi, struktur organisasi, *core value*, rencana strategis, identifikasi aplikasi dan proses bisnis pada Kabupaten Kuningan.

Bab V Analisis dan Perancangan

Bab ini menjelaskan dua bagian yaitu perancangan dan analisa. Bagian analisa menjelaskan kondisi aplikasi dan layanan saat ini yang digunakan oleh Kabupaten Kuningan dan bagian perancangan akan menjelaskan usulan berupa target pada Kabupaten Kuningan.

Bab VI Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian tugas akhir dan saran yang diberikan untuk perbaikan pada penelitian selanjutnya dan Kabupaten Kuningan.